

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Persediaan

2.1.1 Pengertian Persediaan

Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi yang akan di jual atau yang akan digunakan.

Dalam PSAK no 14 yang sudah direvisi pada tahun 2010 :

05 berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Persediaan adalah aktiva :

- a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;**
- b) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau**
- c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (Supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.**

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Menurut Kebijakan Akuntansi BMN (Barang Milik Negara) dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang disajikan dalam Laporan Akuntansi Keuangan Pemerintah. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan definisi mengenai Persediaan sebagai berikut:

“Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan oprasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, (2002:394) dalam bukunya “Akuntansi Intermediate” (2002:394) definisi persediaan adalah :

“Inventories are asset items held for sale in the ordinary course of business or goods that will be used or consumed in the production of goods to be the sold.”

Penjelasan dari kutipan di atas yaitu :

“Persediaan mencakup barang yang ditujukan untuk dijual dalam pelaksanaan normal usaha, serta bahan baku dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.”

2.1.2 Eksplorasi

2.1.2.1 Definisi Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi (*exploration*) atau pencarian adalah setiap usaha dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah-daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Mengusahakan ijin untuk memulai kegiatan eksplorasi di daerah tertentu.

Melakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologis dan geofisik di lapangan.

Menginterpretasikan data yang dihasilkan dala penyelidikan ini. Melakukan pengeboran sumur, termasuk sumur uji stratigrafi, di daerah yang belum terbukti mengandung cadangan. Memperoleh dan membangun aktiva tetap yang berhubungan dengan kegiatandi atas. Menggunakan jasa yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan di atas.

2.1.2.2 Kegiatan Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi dan pemboran sumur uji stratigrafi. Penyelidikan topografi adalah kegiatan pengukuran permukaan tanah yang bertujuan untuk membuat peta suatu daerah tertentu dan mengetahui sifat-sifat tanahnya. Penyelidikan geologi diantaranya terdiri dari penginderaan jauh foto udara (*side looking air radar = SLAR*), geologi lapangan dan geokimia yang bertujuan untuk:

- a. Menentukan ada tidaknya cekungan sedimen.
- b. Menentukan jenis lapisan, ketebalan dan umur batuan yang tersingkap di daerah penyelidikan.
- c. Menentukan potensi dan kematangan batuan induk hidrokarbon
- d. Menentukan jebakan minyak dan gas bumi, baik struktur maupun stratigrafi.
- e. Mengkaji kemungkinan adanya batuan cadangan serta jenis minyak dan gas bumi yang terkandung di dalamnya.

Penyelidikan geologi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Persiapan yang meliputi program kerja dan perijinan.
- b. Pengumpulan data lapangan melalui SLAR ataupun pengambilan contoh langsung dilapangan.
- c. Pengolahan, penganalisaan, penafsiran, pengevaluasian, dan pengkajiulangan data.

Penyelidikan geofisika antara lain meliputi kegiatan penyelidikan gravitasi, magnetik dan seismik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui pola struktur regional
- b. Menentukan bentuk lapisan batuan di bawah permukaan bumi.
- c. Menentukan bentuk jebakan minyak dan gas bumi serta kedalamannya.
- d. Menentukan titik pemboran pada lokasi siap bor.

Kegiatan penyelidikan geofisika dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Persiapan yang meliputi program kerja dan perijinan.
- b. Pengumpulan data lapangan melalui perekaman udara yang terdiri dari *aerogravity* dan *aeromagnetic* serta perekaman di lapangan yang terdiri dari gravitasi magnetik dan seismik.
- c. Pengolahan, penganalisaan, penafsiran, pengevaluasian dan pengkajiulangan data.

Pemboran sumur eksplorasi, terdiri dari pemboran sumur taruhan (*wild cat*) dan sumur kajian (*delineasi*), bertujuan untuk mengetahui data rinci stratigrafi dan penentuan ada tidaknya cadangan minyak dan gas bumi dalam arti ekonomis.

Kegiatan pemboran eksplorasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Persiapan yang meliputi program kerja, perijinan dan pembebasan tanah.
- b. Penyediaan angkutan alat-alat berat.
- c. Pembuatan jalan dan lokasi pemboran
- d. Pengadaan alat dan fasilitas pemboran yang terdiri antara lain dari *rig unit*, *wireline logging unit*, *cementing unit*, *platform* dan *base camp*.

- e. Pelaksanaan pemboran yang meliputi pembuatan sumur, pengumpulan data teknis pemboran yang terdiri dari data geologis dan ptofisika, serta pengevaluasian data yang dilakukan secara terus menerus.
- f. Pengujian lapisan batuan yang dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi data.
- g. Perampungan atau penutupan sumur.

Pemboran sumur uji stratigrafi terdiri dari kegiatan pemboran berdasarkan hasil penyelidikan geologi, menguji batuan dan sumur yang dapat ditinggalkan (*expendable holes*) yang berkaitan dengan eksplorasi hidrokarbon. Tujuan pemboran sumur uji stratigrafi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi tertentu. Pemboran semacam ini pada umumnya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan hidrokarbon.

2.1.2.3 Jenis Biaya Eksplorasi

Biaya eksplorasi meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi dan pemboran sumur uji stratigrafi.

Biaya penyelidikan topografi antara lain :

- a. Biaya pengukuran tanah
- b. Biaya pemetaan tanah
- c. Biaya analisa sifat tanah.

Biaya penyelidikan geologi antara lain :

- a. Biaya SLAR

- b. Biaya geologi lapangan
- c. Biaya geokimia.

Biaya penyelidikan geofisika antara lain :

- a. Biaya gravitasi
- b. Biaya magnetik
- c. Biaya seismik.

Biaya pemboran sumur eksplorasi terdiri dari biaya tak berwujud (*intangible*) dan biaya berwujud (*tangible*). Biaya yang tidak berwujud antara lain meliputi :

- a. Biaya persiapan (pembebasan tanah, pematian jalan dan pembangunan lokasi)
- b. Biaya pemboran
- c. Biaya mata bor (*drilling bits*)
- d. Biaya lumpur (*mud*)
- e. Biaya selubung (*casing*)
- f. Biaya semen
- g. Biaya penyelidikan di bawah tanah (*logging*)
- h. Biaya pengujian dan perampungan
- i. Biaya gaji
- j. Biaya pengangkutan alat pemboran
- k. Biaya pengangkutan lainnya
- l. Biaya perkemahan
- m. Biaya lainnya.

Sedang biaya yang berwujud dalam pemboran sumur eksplorasi antara lain meliputi :

- a. Sitang sembur (*Christmas tree*)
- b. Semburan kepala sumur (*well head*)
- c. Tubbing
- d. Pompa
- e. Batang Hisap (*suck rods*)

Biaya pemboran sumur uji stratigrafi terdiri atas biaya pemboran di daerah cadangan tidak terbukti (*exploratory type*) dan di daerah cadangan terbukti (*development type*). Jenis-jenis biayanya tidak berbeda dengan jenis-jenis biaya pada pemboran sumur eksplorasi yang telah dirinci di atas.

2.1.2.4 Perlakuan Akuntansi Terhadap Biaya Eksplorasi

Kegiatan Eksplorasi meliputi penyelidikan topografi, geologi, pemboran, sumur eksplorasi dan pemboran sumur uji stratigrafi. Perlakuan biaya eksplorasi dapat menggunakan baik metode *Full Costing* (FC) maupun *Successful Efforts* (SE). Menurut metode *Full Costing* (FC) semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi di dalam suatu negara sebagai pusat biaya. Menurut metode *Successful Efforts* (SE), semua biaya-biaya eksplorasi, di luar biaya-biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi (termasuk sumur eksplorasi tipe stratigrafi) yang mempunyai cadangan terbukti, diperlakukan sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya, kecuali tanah yang mempunyai nilai ekonomis, biaya pemboran

sumur eksplorasi, baik tak berwujud maupun berwujud, dikapitalisasi sebagai beban jika cadangan tersebut tidak ditemukan.

2.1.3 Arti Penting Persediaan

Persediaan pada umumnya, dipisahkan berdasarkan pokok pikiran meliputi jenis barang yang cukup banyak dan merupakan bagian yang cukup berarti dari seluruh aktiva perusahaan. Di samping itu, transaksi yang berhubungan dengan persediaan merupakan aktivitas yang paling sering terjadi. Persediaan barang dagang pada umumnya dinilai pada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau nilai yang diharapkan dapat direalisasikan. Cara penilaian dan metode penetapan harga pokok harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menurut Soemarso S. R, (2004:384) dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” menyatakan bahwa :

“Dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan baik neraca maupun laba rugi. Persediaan barang dagang yang tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada akuntansi. Di laporan laba rugi, persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok penjualan. Ada saling berhubungan antara persediaan di neraca dengan laporan laba rugi. Bahkan ada saling berhubungan antara persediaan barang pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang.dari adanya saling berhubungan, terlihat betapa pentingnya pos ini dalam menentukan laba (rugi) dan posisi keuangan perusahaan, tidak saja terhadap tahun berjalan, tetapi juga tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang akan mempengaruhi tidak saja laporan laba rugi dan neraca tahun berjalan tetapi juga neraca dan laporan laba rugi tahun yang akan datang”.

2.1.4 Sifat Persediaan

Persediaan merupakan unsur aktiva yang bersifat *liquid* atau bernilai tinggi. Investasi dalam persediaan biasanya merupakan aktiva lancar paling besar dari perusahaan dagang (*ritel*) dan manufaktur Untuk perusahaan pabrik atau manufaktur, yang termasuk persediaan adalah barang-barang yang akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya

2.1.5 Penggolongan Persediaan

Penggolongan persediaan tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri, yaitu apakah perusahaan dagang atau industri.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.14 (2009:14.7), menyatakan bahwa :

07. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, misalnya, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali , atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam paragraph 18, di mana entitas belum mengakui pendapatan yang terkait (lihat PSAK 23: Pendapatan).

Bagi perusahaan dagang yang usahanya adalah membeli dan menjual kembali barang-barang, persediaannya meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan dan siap untuk dijual kembali kepada pelanggan. Dengan kata lain perusahaan membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Persediaan dalam perusahaan dagang disebut persediaan barang dagangan (*merchandise*

inventory). Sedangkan dalam perusahaan industri (*manufaktur*), pedagang eceran (*retailer*), persediaan terdiri dari :

a. Persediaan bahan baku (*Raw material inventory*)

Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi.

b. Persediaan barang dalam proses (*Work in process inventory*)

Persediaan barang dalam proses terdiri dari bahan-bahan yang telah diproses namun masih membutuhkan pengerjaan lebih lanjut atau barang setengah jadi sebelum dijual.

c. Persediaan barang jadi (*Finished good inventory*).

Persediaan barang jadi adalah barang-barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan.

2.1.6 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan ini dapat dicatat dengan dua sistem yaitu: Sistem *Periodik* dan Sistem Perpetual.

2.1.6.1 Metode Fisik (*Periodik*)

Metode fisik adalah metode penghitungan secara langsung (*stock opname*) untuk mengetahui persediaan akhir. Setelah persediaan barang yang ada di gudang dihitung baru bisa diketahui persediaan akhirnya. Dari persediaan ini kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Kelemahan metode fisik (*Periodik*) adalah jika ingin menyusun laporan keuangan dalam jangka pendek maka penghitungan

persediaan ini akan memakan waktu yang lama. Mutasi keluar masuk persediaan tidak diketahui jadi kemungkinan ada penyimpangan persediaan tidak diketahui.

2.1.6.2 Metode Buku (*Perpetual*)

Dalam metode buku (*Perpetual*) setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri. Setiap terjadi masuk dan keluar barang dicatat pada buku sehingga dengan cepat dapat diketahui persediaan akhir.

Kelebihan metode buku (*Perpetual*) adalah adanya kontrol terhadap persediaan barang, misalnya pada akhir tahun dilakukan *stock opname* jika catatan pada buku tidak sama dengan fisik yang sebenarnya maka ada kesalahan. Mungkin ada barang yang hilang atau ada kesalahan dalam pencatatan pada buku.

Table 2.1

Keterangan	<i>Periodik</i>	<i>Perpetual</i>
Pembelian	<i>Purchase</i> xxx <i>Account Payable</i> xxx	<i>Merchandise Inventory</i> xxx <i>Account Payable</i> xxx
Retur Pembelian	<i>Account Payable</i> xxx <i>Purchase Return</i> xxx	<i>Account Payable</i> xxx <i>Merchandise Inventory</i> xxx
Penjualan	<i>Account Receivable</i> xxx <i>Sales</i> xxx	<i>Account Receivable</i> xxx <i>Sales</i> xxx <i>Cost of good sold</i> xxx <i>Merchandise Inventory</i> xxx
Retur Penjualan	<i>Sales Return</i> xxx <i>Account Receivable</i> xxx	<i>Sales Return</i> xxx <i>Account Receivable</i> xxx <i>Merchandise Inventory</i> xxx <i>Cost of good sold</i> xxx

2.1.7 Sistem Penilaian Persediaan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.14 (2009:14.23), menyatakan bahwa

“Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraph 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan”.

Karena adanya perbedaan harga pokok antara waktu membeli dengan waktu menjual atau menggunakan barang, maka diperlukan adanya metode penilaiannya, baik secara *periodik* maupun *perpetual*. Penilaian persediaan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. *Cost*
- b. *Other Cost*

2.1.7.1 Penilaian Persediaan Berdasarkan Biaya (*Cost*)

Apabila barang-barang yang sejenis dibeli selama satu periode akuntansi dengan harga pokok yang berbeda-beda, maka timbul masalah mengenai harga pokok mana yang akan digunakan untuk persediaan akhir barang yang akan dijual. Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, (2002:416) dalam bukunya “Akuntansi Intermediate”, menyatakan bahwa terdapat beberapa metode persediaan dalam metode biaya, yaitu :

1. Identifikasi khusus (*specific identification*).

2. Metode biaya rata-rata (*average cost method*).
3. Metode masuk pertama, keluar pertama atau *first in, first out (FIFO Method)*.
4. Metode masuk akhir, keluar pertama atau *last in, first out (LIFO Method)*.

Dari keempat metode ini sementara akan menghasilkan penilaian persediaan akhir dan harga pokok yang berbeda-beda, sedangkan penilaian akhirnya harus sama.

2.1.7.1.1 Identifikasi Khusus (*specific identification*)

Digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang masih berada di tangan pada persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi yang memungkinkan perusahaan memisahkan pembelian yang berbeda yang telah dilakukan secara fisik. Metode ini dapat diterapkan dengan baik dalam situasi yang melibatkan sejumlah item kecil berharga tinggi dan dapat dibedakan. Dalam industri ritel hal ini meliputi beberapa jenis perhiasan, jas bulu, mobil, dan sejumlah *furniture*. Dalam area manufaktur, meliputi produk pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi menurut *job cost system*.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.14 (2009:14.22), menyatakan bahwa :

22. Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu yang diatribusikan ke unit persediaan tertentu. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi unit yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Namun demikian, identifikasi khusus biaya tidak tepat ketika terdapat jumlah besar unit dalam persediaan yang dapat menggantikan satu sama lain (*ordinarily interchangeable*). Dalam keadaan demikian, metode pemilihan unit yang masih berada dalam persediaan dapat digunakan untuk menentukan dampaknya dalam laporan laba rugi.

Untuk mengilustrasikan metode identifikasi khusus, asumsikan bahwa 6.000 unit persediaan, 1000 unit berasal dari pembelian tanggal 2 Juni, 3.000 unit dari pembelian tanggal 15 Juni, dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Juni. Perhitungan persediaan akhir dan harga pokok penjualan adalah sebagai berikut :

Table 2.2

Tanggal	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Tatal Biaya
		\$	
12-Mar	1,000	4.00	\$ 4,000
15-Mar	3,000	4.40	13,200
30-Mar	2,000	4.75	9,500
Persediaan Akhir	6,000		\$ 26,700
Biaya barang yang tersedia dijual (yang telah dihitung sebelumnya)			\$ 43,900
Dikurangi : Persediaan Akhir			(26,700)
Harga Pokok Penjualan			\$ 17,200

Sumber : Donald E. Kieso Jerry J. Weygandt Terry D. Warfield, "Akuntansi Intermediate", (2002:416).

2.1.7.1.2 Metode Masuk Pertama, Keluar Pertama atau *First in, First Out* (FIFO Method)

Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang digunakan (dikeluarkan) sesuai dengan urutan pembeliannya. Dengan kata lain metode, ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang pertama digunakan (dalam perusahaan manufaktur). Salah satu tujuan dari FIFO adalah menyamai arus fisik barang. Jika arus fisik barang secara aktual adalah yang pertama masuk, yang pertama keluar, maka metode FIFO akan menyerupai metode identifikasi khusus. Pada saat yang sama metode FIFO tidak memungkinkan perusahaan memanipulasi laba karena perusahaan tidak bebas memilih item-item biaya tertentu untuk dimasukkan ke beban.

Selain dianjurkan oleh Pemerintah, metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena :

1. Perhitungan dan pelaksanaannya sederhana.
2. Nilai persediaan akhir pada neraca sesuai dengan harga yang berlaku sekarang.
3. Dapat menghindari kerusakan dan keusangan persediaan.

Tetapi, metode FIFO juga mempunyai kelemahan. Kelemahan ini terlihat jika terjadi inflasi. Dengan adanya inflasi maka barang-barang cenderung meningkat sepanjang waktu, karena biaya dari barang-barang yang dibebankan pada harga pokok barang tersebut merupakan biaya dari barang yang dibeli pertama kali sehingga *Cost of Goods Sold*-nya terlalu rendah maka laba yang dilaporkan terlalu tinggi. Akibatnya pajak yang dibayar oleh perusahaan terlalu tinggi. Kelemahan yang mendasar bahwa biaya berjalan tidak ditandingkan

dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Biaya-biaya yang paling lama dibebankan ke pendapatan paling akhir, yang mungkin akan mendistorsi laba kotor dan laba bersih.

Untuk mengilustrasikan metode *FIFO* adalah ssebagai berikut :

Date	Purchase			COGS			Balance		
	Quantity	Price	Total	Quantity	Price	Total	Quantity	Price	Total
2/3	2,000	\$ 4.00	\$ 8,000						
15/3	6,000	\$ 4.40	\$ 26,400				2,000	\$ 4.00	\$ 8,000
							6,000	\$ 4.40	\$ 26,400
19/3				2,000	\$ 4.00	\$ 8,000			
				2,000	\$ 4.40	\$ 8,800	4,000	\$ 4.40	\$ 17,600
30/3	2,000	\$ 4.75	\$ 9,500				4,000	\$ 4.40	\$ 17,600
							2,000	\$ 4.75	\$ 9,500
Total						\$ 16,800			\$ 27,100

Tabel 2.3

Sumber : Donald E. Kieso Jerry J. Weygandt Terry D. Warfield, “Akuntansi Intermediate”, (2002:419).

Penjelasan dari tabel di atas adalah :

Persediaan akhir = \$ 27.100 (17.600+9.500)

Harga pokok penjualan = \$ 16.800 (8.000+8.800)

Apabila menggunakan metode *FIFO*, walaupun sistem pencatatannya berbeda (periodik atau perpetual), persediaan akhir (*ending inventory*) dan harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) pada akhir periode akan sama besar jumlahnya.

2.1.7.1.3 Metode Masuk Terakhir, Keluar Pertama atau *Last in, First Out* (*LIFO Method*)

Metode *LIFO* mengasumsikan bahwa barang-barang yang terakhir dibeli atau diproduksi akan dijual atau terlebih dahulu, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah barang-barang yang dibeli atau diproduksi pertama kali.

Metode *LIFO* mempunyai kelebihan, yaitu :

1. Manfaat pajak

Pengguna *LIFO* dapat memberikan penangguhan sementara atas penerapan pajak penghasilan sehingga memungkinkan penghematan kas sepanjang tingkat harga terus menerus meningkat dan kuantitas persediaan tidak menurun. Dengan penghematan kas perusahaan dapat melunasi pinjaman dan menurunkan biaya bunga atau berinventasi guna memperoleh pendapatan.

2. Pengukuran laba yang baik, karena *LIFO* mengalokasikan gambaran laba yang cenderung hanya melaporkan laba operasi dan menggunakan pengakuan keuntungan pemilik persediaan sampai harga atau kuantitas menurun. Laba inflasi yang menyesatkan cenderung tidak tampak sebagai bagian laba bersih bila metode *LIFO* digunakan.

Metode *LIFO* mempunyai kekurangan, yaitu :

1. Memperkecil laba

Penerapan harga terbaru terdapat pendapatan berjalan akan menghasilkan penurunan laba pada periode inflasi. Akibatnya jika pemakai laporan keuangan tidak paham bahwa laba yang rendah itu disebabkan penggunaan *LIFO*, maka harga pasar saham perusahaan akan memburuk.

2. Saldo persediaan yang tidak realistis pada neraca

Alokasi biaya persediaan akan dilaporkan lebih rendah dari harga pasar atau nilai ganti periode berjalan.

3. Asumsi arus biaya tidak realistis

Pembebanan harga pokok berdasarkan *LIFO* tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkirakan arus fisik barang dalam perusahaan.

2.1.7.1.4 Metode Biaya Rata-rata (*Average Cost Method*)

Menurut metode ini persediaan dinilai atas dasar menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Metode ini tergantung pada sistem pencatatan yang digunakan. Sistem pencatatan periodik menggunakan metode Harga Pokok Rata-rata Tertimbang sedangkan pencatatan perpetual menggunakan metode Harga Pokok Rata-rata bergerak. Metode harga pokok rata-rata ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. *Simple Average* : harga beli dari setiap kali melakukan pembelian dibagi dengan jumlah melakukan pembelian, dilakukan akhir periode.

- b. *Weighted Average* : harga beli dari setiap kali melakukan pembelian dikalikan dengan unit yang dibeli dibagi dengan jumlah unit pembelian, dilakukan akhir periode.
- c. *Moving Average* : harga beli dirata-ratakan setiap melakukan pembelian perpetual.

Untuk megilustrasikan metode rata-rata (*average*) menurut H. M. Alan Jayaatmaja, S.E.,M.M.,Ak. (...:80), dalam bukunya “Akuntansi Intermediate”, asumsikan bahwa persediaan barang dagangan Disket tanggal 1 Mei 2003 sebanyak 25 unit @ Rp 240,-. Selama bulan Mei 2003 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pembelian:

Tanggal	Banyak Unit	Harga	Total
5-May-03	100	Rp 250	Rp 25,000
15-May-03	150	Rp 260	Rp 39,000
25-May-03	125	Rp 275	Rp 34,375

Penjualan:

Tanggal	Banyak Unit	Harga	Total
10-May-03	75	Rp 300	Rp 22,500
20-May-03	175	Rp 315	Rp 55,125
30-May-03	100	Rp 325	Rp 32,500

Berdasarkan transaksi di atas, berikut ini adalah perhitungannya dengan menggunakan metode rata-rata *perpetual*.

Table 2.5

Perpetual Average

Date	Purchase			COGS			Balance		
	Quantity	Price	Total	Quantity	Price	Total	Quantity	Price	Total
1/5							25	240	6,000
5/5	100	250	25,000				125	248	31,000
10/5				75	248	18,600	50	248	12,400
15/5	150	260	39,000				200	257	51,400
20/5				175	257	44,975	25	257	6,425
25/5	125	275	34,375				150	272	40,800
30/5				100	272	27,200	50	272	13,600

Penerapan semua asumsi pada ke empat metode ini berlaku untuk penggunaan system *Periodik* maupun *Perpetual*.

Kadang kala situasi tidak memungkinkan dilakukan penghitungan fisik atau sistem *perpetual* sangat mahal untuk diterapkan. Suatu supermarket dengan seribu macam jenis persediaan mungkin akan terganggu operasionalnya jika setiap bulan harus melakukan perhitungan fisik persediaan dalam rangka menyusun

laporan keuangan bulanan. Perusahaan asuransi dalam menentukan besarnya kerugian atas persediaan yang terbakar tidak mungkin menghitung secara fisik barang yang terbakar karena barangnya sudah rusak bahkan habis. Dengan keadaan demikian mendorong dilakukan penaksiran cost dari persediaan. Terdapat dua metode yang sering digunakan yaitu **metode harga eceran** dan **metode laba kotor**.

2.1.7.2 Penilaian Persediaan Berdasarkan Biaya Tambahan (*Other Cost*)

Metode penilaian berdasarkan harga pokok menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan adanya penurunan nilai persediaan setelah beli, bagaimana menentukan persediaan yang terbakar, bagaimana menentukan persediaan yang macamnya banyak yang harus dihitung setiap periode, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya cara penilaian lain selain harga pokok yaitu :

1. Metode *Lower Cost or Market*
2. Metode Dasar Penilaian
3. Metode Laba Kotor
4. Metode Persediaan Eceran

2.1.7.2.1 Metode *Lower Cost or Market* (LCM)

Metode *Lower Cost or Market* digunakan terutama bila terjadi penurunan manfaat atau manfaat kegunaan persediaan barang tersebut. Penyebab penurunan manfaat dari persediaan adalah barang cacat, rusak, aus, perubahan mode dan lainnya. Istilah yang digunakan dalam *Lower Cost or Market* ada 5 :

- a. **Harga Pasar** (*Market value*) dalam konteks *LCM* sebagai dasar pengukuran atau penilaian persediaan adalah harga pokok pengganti sekarang baik dengan cara membeli atau dengan cara reproduksi dengan syarat harga pasar tersebut tidak melebihi batas atas dan tidak melebihi batas bawah.
- b. **Batas atas** (*ceiling*) adalah nilai realisasi bersih persediaan, taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya penjualan.
- c. **Batas bawah** (*floor*) adalah nilai realisasi bersih dikurangi margin laba normal atau batas atas dikurangi harga normal.
- d. **Biaya pengganti** (*replacement cost*) digunakan untuk menyatakan nilai pasar karena penurunan biaya pengganti suatu barang biasanya mencerminkan atau meramalkan penurunan harga jual. Pemakaian biaya pengganti memungkinkan suatu perusahaan untuk mempertahankan tingkat laba kotor yang konsisten atas penjualan (margin laba kotor normal).
- e. **Nilai realisasi bersih** (*net realizable value-NRV*) adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan penjualan yang dapat diprediksi secara layak. Jumlah tersebut dikurangkan dengan margin laba normal untuk menghasilkan nilai realisasi bersih dikurangi margin laba normal (*net realizable value less a normal profit margin*).

Selain itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan penggunaan metode *Lower Cost or Market* adalah sebagai berikut :

- a. Setelah menerapkan harga pokok pengganti, tentukan batas atas dan batas bawah.
- b. Bandingkan harga pengganti, batas atas dan batas bawah kemudian pilih nilai tengah dari ketiganya untuk menentukan harga pasar.
- c. Memilih yang paling rendah diantara cost dan harga pasar, untuk menentukan harga yang akan disajikan di neraca.

Dalam metode *LCM* bila terjadi penurunan persediaan dibawah costnya artinya harga pasar sekarang lebih kecil dari costnya, maka persediaan harus disajikan didalam laporan keuangan sebesar harga pasarnya untuk mencatat penurunan persediaan tersebut dapat digunakan :

a. Metode langsung

Dalam metode ini harga pokok terdapat dalam persediaan akhir, diganti langsung dengan harga pasarnya. Sehingga kerugian nilai persediaan tidak nampak dineraca, karena dimasukkan dalam rekening *cost of goods sold*.

b. Metode cadangan

Dalam metode ini harga pokok yang terdapat dalam persediaan akhir, tidak diganti melainkan dibuatkan rekening cadangan untuk menampung kerugian penurunan nilai persediaan tersebut. Sehingga kerugian penurunan nilai persediaan Nampak di neraca, karena rekening cadangan tersebut sebagai pengurang rekening persediaan.

Pada metode *LCM*, nilai persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah diantara harga pokok historis dan harga pasar. Metode *LCM* dapat diterapkan untuk melakukan penilaian persediaan :

- a. Secara keseluruhan
- b. Perkelompok
- c. Individual

Evaluasi atas aturan *LCM*

Aturan *LCM* memiliki beberapa defisiensi atau kelemahan konseptual, yaitu :

- a) Penurunan nilai aktiva dan pencatatannya sebagai beban diakui pada periode ketika kerugian utilitas ini terjadi bukan pada periode penjualan. Pada sisi lain, kenaikan nilai aktiva hanya diakui pada saat penjualan terjadi. Perlakuan ini tidak konsisten dan dapat menyebabkan data laba terdistorsi.
- b) Aplikasi aturan *LCM* menghasilkan inkonsistensi karena persediaan perusahaan mungkin dinilai menurut biaya dalam satu tahun dan pada harga pasar dalam tahun berikutnya.
- c) *LCM* menilai persediaan dalam neraca secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi mungkin atau tidak bersifat konservatif. Laba bersih tahun berjalan ketika kerugian diakui jelas lebih rendah (laba bersih) untuk periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari normal jika penurunan yang diterapkan atas harga jual tidak material.
- d) Aplikasi aturan *LCM* menggunakan “laba normal” dalam menentukan nilai persediaan. Karena laba normal merupakan angka estimasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu (dan mungkin tidak berlaku lagi di masa depan), maka “laba normal” bersifat tidak objektif dan memberikan peluang untuk memanipulasi laba.

Banyak pemakai laporan keuangan menyukai laporan *LCM* karena mereka sedikitnya mengetahui bahwa persediaan tidak lebih saji. Selain itu, mengakui adanya kerugian tidak mengantisipasi keuntungan umumnya menghasilkan laba yang lebih rendah.

2.1.7.2.2 Metode Dasar Penilaian

A. Penilaian menurut Nilai realisasi Bersih (*Net Realizable Value*)

Dalam situasi terbatas, pencatatan persediaan menurut nilai realisasi bersih mendapat dukungan dari berbagai pihak sekalipun jumlah ini melampaui biaya. Pengecualian atas aturan pengakuan normal ini dibolehkan oleh GAAP jika :

1. Terdapat pasar terkendali dengan harga kuota yang berlaku bagi semua kuantitas.
2. Tidak ada penjualan yang signifikan. Sebagai contoh, perusahaan pertambangan biasanya melaporkan persediaan mineral tertentu (khususnya logam yang langka) pada harga jual karena sering kali terdapat pasar terkendali tanpa biaya penjualan yang signifikan. Perlakuan yang sama juga berlaku pada produk-produk pertanian yang dapat langsung dipasarkan dengan harga yang berlaku dipasar.
3. Kadang-kadang angka biaya sulit dihitung. Dalam sebuah pabrik manufaktur, berbagai komponen bahan baku dan komponen yang dibeli dicampur untuk menciptakan barang jadi sehingga angka biaya tidak sulit ditentukan. Berbagai barang dalam persediaan, dapat diperhitungkan atas dasar biaya karena biaya dari setiap komponen telah diketahui.

B. Penilaian dengan Menggunakan Nilai Penjualan Relatif

Metode ini digunakan dalam industri untuk menilai (pada biaya) banyak produk dan produk sampingan yang diperoleh dari satu barel minyak tanah.

2.1.7.2.3 Metode Laba Kotor

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, (2002:474) dalam bukunya “Akuntansi Intermediate”, menyatakan bahwa metode laba kotor (*gross profit margin*) didasarkan pada tiga asumsi, yaitu :

- 1. Persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang diperhitungkan;**
- 2. Barang yang belum terjual harus berada di tangan;**
- 3. Jika penjualan, dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian, maka hasilnya adalah persediaan akhir.**

Syarat menggunakan metode laba kotor, elemen yang harus ditentukan lebih dahulu, agar metode laba kotor dapat digunakan adalah :

- a. Harga pokok persediaan awal.
- b. Harga pokok bersih selama satu periode.
- c. Penjualan.
- d. Persentase Laba Kotor.

Tahap-tahap yang harus dilakukan di dalam menerapkan laba kotor adalah sebagai berikut :

1. Menaksir prosentase laba kotor berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Menentukan taksiran harga pokok penjualan dengan mengurangi penjualan bersih dengan laba kotor.

$$\text{Harga Pokok Penjualan} = \text{Penjualan} - \text{Laba Kotor}$$

3. Menentukan barang siap dijual dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian.

Persediaan awal + Pembelian

4. Menentukan taksiran harga pokok persediaan akhir dengan mengurangi persediaan siap dijual dengan taksiran harga pokok penjualan.

Persediaan akhir = Barang siap dijual – Harga Pokok Penjualan

Persediaan akhir ditentukan dengan cara persediaan awal ditambah dengan pembelian selama satu periode kemudian dikurangi dengan harga pokok barang yang di jual pda periode yang bersangkutan. Untuk menentukan harga pokok penjualan, penjualan yang telah dicatat dalam rekening penjualan dikurangi dengan laba kotor nya. Umumnya laba kotor ini sudah diketahui %-nya. Jika belum diketahui, % laba kotor nya digunakan % laba kotor tahun-tahun sebelumnya. Misalkan persediaan awal tahun 2005 Rp 100.000 pembelian selama bulan Januari Rp 1.200.000 dan penjualan selama bulan Januari menurut rekening buku besar Rp 90.000 dan laba kotor 20% dari harga jual, maka persediaan akhir dapat dihitung sebagai berikut:

Persediaan 1 Jan 20xx		Rp 100.000
Pembelian Jan 20xx		Rp 1.200.000
Barang tersedia untuk di jual		Rp 1.300.000
Penjualan	Rp 900.000	
Laba kotor (20% x Rp 900.000)	Rp 180.000	
Harga pokok barang yang di jual		Rp 720.000
Persediaan akhir		Rp 580.000

Menurut Sumber yang lain, persediaan juga menimbulkan biaya-biaya lain yang disebut juga Biaya Variabel dari persediaan tersebut dapat digolongkan kedalam :

1. Procurement atau Ordering Cost

Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari :

- 1) Biaya selama proses pesanan
 - a. Persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pemesanan
 - b. Penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan
- 2) Biaya pengiriman pesanan
- 3) Biaya penerimaan barang yang dipesan
 - a. Pembongkaran dan pemasukan ke gudang
 - b. Pemeriksaan material yang diterima
 - c. Mempersiapkan laporan penerimaan
 - d. Mencatat kedalam "*Material Record Card*"
- 4) Biaya-biaya processing pembayaran
 - a. Auditing dan perbandingan antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli
 - b. Persiapan pembuatan cheque untuk pembayaran
 - c. Pengiriman *cheque* dan kemudian auditnya

2. Carrying Cost

Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya *carrying cost* didasarkan pada "*Average Inventory*" (persediaan rata-rata), dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari

nilai dalam rupiah dari *average inventory*. Biaya-biaya yang termasuk kedalam *carrying cost* adalah :

- 1) Biaya penggunaan/sewa ruangan gudang
- 2) Biaya pemeliharaan material dan allowances untuk kemungkinan rusak
- 3) Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli
- 4) Biaya asuransi
- 5) Biaya modal
- 6) Biaya *absolence*
- 7) Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang

2.1.7.2.4 Metode Harga Eceran (*Retail Inventory Method*)

Menurut H. M. Alan Jayaatmaja, S.E.,M.M.,Ak. (...:92), dalam bukunya “Akuntansi Intermediate”, menyatakan bahwa :

“Metode eceran merupakan metode penilaian persediaan yang didasarkan kepada taksiran. Taksiran harga pokok dalam metode ini ditentukan dengan melihat hubungan antara harga perolehan dengan harga pokok eceran. Metode eceran digunakan pada toko atau super market. Metode ini dipilih karena jenis usaha tersebut tidak untuk menggunakan metode historis, baik melalui perhitungan fisik maupun mengikuti mutasi persediaan dengan sistem perpetual”.

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penilaian persediaan dengan metode eceran, yaitu :

- a) Harga eceran mula-mula adalah harga jual pertama yang ditentukan perusahaan.
- b) *Mark Up* adalah kenaikan harga diatas harga jual mula-mula.
- c) *Mark Up Cancellation* adalah penurunan harga setelah adanya *mark up* tetapi penurunan ini tidak lebih besar dari *mark up*.
- d) *Mark Up Net* adalah *mark up* dikurangi dengan *mark up cancellation*.
- e) *Mark Down* adalah penurunan harga dibawah harga jual mula-mula.
- f) *Mark Down Cancellation* adalah pembatalan penurunan harga sesudah adanya *mark down* tetapi penurunannya tidak lebih besar dari *mark down*.

g) *Mark Down Net* adalah *mark down* dikurangi dengan *mark down cancellation*.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, (2002:477) dalam bukunya “Akuntansi Intermediate”, metode persediaan eceran (*retail inventory method*), mensyaratkan bahwa pencatatan dilakukan atas :

- a) Total biaya dan nilai eceran dari barang yang dibeli.**
- b) Total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual.**
- c) Penjualan periode berjalan**

Pos-pos khusus yang berhubungan dengan metode eceran yaitu :

- A. Pos-pos yang berhubungan dengan pembelian :
 - a. Biaya angkut pembelian diperlakukan hanya menambah cost saja.
 - b. Retur pembelian diperlakukan mengurangi cost dan retailnya.
 - c. Potongan pembelian diperlakukan mengurangi cost saja.
 - d. Barang cacat, rusak atau aus diperlakukan mengurangi cost dan retailnya.
- B. Pos-pos yang berhubungan dengan penjualan :
 - a. Retur penjualan diperlakukan mengurangi retail saja.
 - b. Potongan penjualan tidak diperhitungkan.
 - c. Potongan penjualan untuk karyawan diperlakukan mengurangi retail saja.

Cost persediaan ditentukan dengan mengkonversi persediaan menurut harga eceran dengan menggunakan prosentase cost terhadap harga eceran.

2.1.8 Tujuan Persediaan

Persediaan juga bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan juga pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan persediaan pada perusahaan untuk mendukung :

2.1.8.1 Tertib Administrasi Barang

Telah kita ketahui bahwa administrasi dan pembukuan barang milik Negara dapat dikatakan belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu perlu adanya keseragaman dalam pelaksanaan.

2.1.8.2 Penghematan Keuangan Negara

Bilamana baran-barang milik Negara yang dibawah penguasaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah di kelola dalam persediaan secara tertib dan teratur, selanjutnya setiap pengadaan barang didasarkan pada perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dengan melihat pada perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dengan melihat pada daftar persediaan (sebagai sumber data informasi) yang telah dimiliki oleh Departemen Energi Sumber Daya Mineral. Dengan adanya daftar persediaan barang-barang milik Negara sebagai data informasi, diharapkan tidak akan terjadi pengadaan barang atas dasar taksiran (perkiraan) saja. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya penumpukan barang dan pemborosan uang Negara.

2.1.8.3 Mempermudah Pengawasan Barang-Barang

Pengawasan atas Barang-barang milik Negara sangat diperlukan dalam rangka pengendalian atas barang milik Negara tersebut. Salah satu caranya adalah dengan pembuatan buku persediaan barang-barang milik Negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek, baik ditingkat pusat maupun daerah. Buku Persediaan tersebut merupakan suatu data informasi

2.1.9 Fungsi Persediaan

Daftar Persediaan yang lengkap, teratur dan berkesinambungan mempunyai fungsi antara lain :

1. Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan setiap barang.
2. Usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya secara masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.
4. Menyediakan data untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan barang.
5. Memberikan informasi untuk dijadikan bahan pengarah pengadaaan barang.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pendistribusian barang.
7. Memberikan petunjuk dalam rangka pendistribusian barang.
8. Menyediakan data/informasi dalam menentukan barang tua, rusak, dan barang berlebih serta penghapusaannya dari pertanggung jawaban.
9. Membina katalogisasi dan Standarisasi barang.

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai fungsi penting persediaan. Fungsi tersebut menurut Handoko (2000), antara lain :

a. Fungsi *Decoupling*

Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan *decoupling* ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier.

b. Fungsi *Economic Lot Sizing*

Persediaan *lot size* ini perlu mempertimbangkan penghematan (potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah, dsb), karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi dan resiko, dsb).

c. Fungsi Antisipasi

Perusahaan sering menghadapi fluktuasi permintaan, yang dapat diperkirakan atau diramalkan berdasarkan pengalaman atau data data masa lalu. Disamping itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang barang selama periode pemesanan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra yang sering disebut persediaan pengaman (*safety inventories*). Pada kenyataannya, persediaan pengaman merupakan pelengkap fungsi *decoupling*. Persediaan antisipasi ini penting agar proses produksi tidak terganggu.

Selain fungsi fungsi di atas, menurut Herjanto (1997) terdapat enam fungsi penting yang dikandung oleh persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, antara lain :

- a. Menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan
- c. Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi.
- d. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan bila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran.
- e. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas (*Quantity discount*).

2.1.10 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Persediaan

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral didasarkan pada :

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteits Wet*) Stbi. 922 Nomor 448, tentang cara pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 92 Tahun 1968;
2. Stbl. 1901 Nomor 325 tentang Kewajiban Departemen memberikan data yang menyangkut pembinaan barang-barang tetap;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang rumah tangga;

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1968 tanggal 17 Januari 1968 tentang Penertiban Tata Usaha Keuangan Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
6. Surat Keputusan Menkeu Nomor KEP/225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
7. Surat Edaran Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Nomor 681/TUKN/H-IV/6-74 tanggal 1 Juni 1974 Perihal Pedoman Pelaksanaan dari Surat Menteri Keuangan Nomor KEP/225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971;
8. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 perihal Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tanggal 23 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Surat Edaran Bersama Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor SEB.6850/d.VI/12/94 tanggal 2 Desember 1994, perihal Penyerahan Proyek 159/A/31/1294 yang seluruhnya atau sebagian telah selesai;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara;
12. Surat Edaran Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan Nomor SE-01/AK/1995 tanggal 5 Januari 1995 perihal Tata cara Penaksiran Nilai Tanah dan Bangunan Gedung yang tidak Memiliki Dokumen Barang;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 tahun 2001 tanggal 2 maret 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.1.11 Organisasi Kegiatan Persediaan

Organisasi Akuntansi BMN

Secara umum, struktur organisasi akuntansi Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Standar Akuntansi Barang Milik Negaara (SABMN) ditetapkan sebagai berikut :

2.1.11.1 Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

UAPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kementrian negara/lembaga (pengguna barang), penganggung jawabnya adalah Mentri/Pimpinan Lembaga.

2.1.11.2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAAPPB-E1)

UAAPPB-E1 merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat eselon penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.

2.1.11.3 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

UAPPB-W merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di kantor wilayah yang ditetapkan sebagai koordinator,

penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi penanggung jawabnya adalah Gubernur, sedangkan untuk UAAPPB-W Tugas Pembantuan penanggung jawabnya adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian Negara/lembaga.

2.1.11.4 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (USKPB)

UAKPB merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna barang) yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. Penanggung jawab UAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan penanggung jawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).